



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1117/K.1/SDM.01.1
Lampiran : 3 Berkas
Hal : Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
Deputi Bidang Kajian Kebijakan
Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Jakarta, 1 April 2016

Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Lembaga Negara
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian
3. Sekretaris Utama Lembaga Pemerintahan Non Kementerian
4. Sekretaris Daerah Provinsi di Indonesia

di

Tempat

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputi Bidang Kajian Kebijakan, akan diselenggarakan Seleksi Terbuka yang dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana pengumuman terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengharapkan bantuan Saudara untuk dapat menginformasikan pelaksanaan Seleksi Terbuka untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputi Bidang Kajian Kebijakan dimaksud kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Saudara. Informasi lengkap tentang ketentuan, persyaratan, tahapan seleksi terbuka dan pendaftaran online dapat dilihat di www.lan.go.id

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Lembaga Administrasi Negara
Sekretaris Utama, *ya*



Sri Hadiati Wara Kustriani
Sri Hadiati Wara Kustriani

Tembusan Yth.:

1. Menteri PAN dan RB;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.



"BAGIAN SDM LAN"

A. Sekretariat Lembaga Negara

1. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;
3. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung;
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;

B. Sekretariat Kementerian dan Setingkat Kementerian

1. Sekretariat Kabinet;
2. Kementerian Sekretariat Negara;
3. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
7. Kementerian Dalam Negeri;
8. Kementerian Luar Negeri;
9. Kementerian Pertahanan;
10. Kementerian Agama;
11. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Kementerian Keuangan;
13. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
15. Kementerian Kesehatan;
16. Kementerian Sosial;
17. Kementerian Ketenagakerjaan;
18. Kementerian Perindustrian;
19. Kementerian Perdagangan;
20. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
21. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
22. Kementerian Perhubungan;
23. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
24. Kementerian Pertanian;
25. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
26. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
27. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
28. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
29. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
30. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
31. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
32. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
33. Kementerian Pariwisata;
34. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
35. Kementerian Pemuda dan Olahraga;

C. Sekretariat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

1. Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Badan Informasi Geospasial;
3. Badan Intelijen Negara;
4. Badan Kepegawaian Negara;
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
9. Badan Narkotika Nasional;
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
12. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
13. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
14. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
15. Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
16. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
17. Badan Pusat Statistik;
18. Badan SAR Nasional;
19. Badan Standardisasi Nasional;
20. Badan Tenaga Nuklir Nasional;
21. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
23. Lembaga Ketahanan Nasional;
24. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
25. Lembaga Sandi Negara;
26. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;

D. Sekretariat Daerah Provinsi

1. Sekretariat Daerah Aceh;
2. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
4. Sekretariat Daerah Provinsi Riau;
5. Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
6. Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;
7. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
8. Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu;
9. Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
10. Sekretariat Daerah Provinsi Bangka Belitung;
11. Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
12. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
13. Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
14. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
17. Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
18. Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
21. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
24. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
25. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
26. Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;
27. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
29. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
30. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
31. Sekretariat Daerah Provinsi Maluku;
32. Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara;
33. Sekretariat Daerah Provinsi Papua;
34. Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.



a.n. Kepala Lembaga Administrasi Negara
Sekretaris Utama,

Sri Hadiati Wara Kustriani



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
NOMOR : 02/P.1/PST.M.1/2016

TENTANG
SELEKSI TERBUKA CALON PIMPINAN TINGGI MADYA
DEPUTI BIDANG KAJIAN KEBIJAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TAHUN 2016

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN), sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan ini Panitia Seleksi Terbuka mengundang Pegawai Negeri Sipil, yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri dalam rangka mengikuti seleksi terbuka, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. JABATAN YANG LOWONG

Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara.

Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian reformasi administrasi, sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara, desentralisasi dan otonomi daerah, serta pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan.

B. PERSYARATAN UMUM

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Sehat jasmani dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
3. Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun per tanggal 1 April 2016;
4. Memiliki pangkat sekurang-kurangnya Pembina Utama Muda – IV/c;
5. Sedang/pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Jabatan Fungsional Ahli Utama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
6. Kualifikasi Pendidikan minimal Master (S-2), diutamakan Doktor (S-3);
7. Memiliki kompetensi di bidang pengembangan ilmu administrasi negara, dan kajian kebijakan publik;
8. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
9. Telah mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat II dan atau Diklat Kepemimpinan Tingkat I, dikecualikan pelamar dari Jabatan Fungsional Ahli Utama;
10. Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat yang wajib lapor LHKPN dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi Pejabat yang tidak wajib lapor LHKPN;
11. Memperoleh surat persetujuan dari pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian;
12. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, tingkat berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan PP 53 Tahun 2010 yang ditetapkan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan
13. Telah menyerahkan SPT Tahun 2015.

C. PENDAFTARAN

Pendaftaran dibuka secara *online* melalui website www.lan.go.id mulai tanggal **04 April s.d 22 April 2016** pada menu seleksi JPT-LAN di halaman utama Website LAN. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 22 April 2016 pukul 16.00 WIB.

[Handwritten signature]

D. PERSYARATAN LAMARAN

1. Surat lamaran ditandatangani di atas meterai;
2. Pas foto terakhir berwarna;
3. Formulir Persetujuan dari pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian (diunduh pada Website www.lan.go.id);
4. Formulir Daftar Riwayat Hidup (diunduh pada Website : www.lan.go.id);
5. Formulir Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/tingkat berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan PP 53 Tahun 2010 yang ditetapkan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang (diunduh pada Website : www.lan.go.id);
6. Foto copy SK. Pangkat terakhir;
7. Foto copy SK. Pengangkatan dalam Jabatan terakhir;
8. Foto copy Ijazah yang dipersyaratkan;
9. Foto copy Sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat II dan atau Diklat Kepemimpinan Tingkat I dikecualikan pelamar dari Jabatan Fungsional Ahli Utama;
10. Foto copy Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) Tahun terakhir;
11. Foto copy tanda bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi Pejabat/pegawai yang tidak wajib melaporkan LHKPN;
12. Foto copy tanda bukti telah menyerahkan SPT Tahun 2015; dan
13. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari dokter pemerintah.

E. CARA PENDAFTARAN

1. Mengisi formulir pendaftaran *online* JPT Madya pada Website www.lan.go.id;
2. Mengunggah seluruh dokumen persyaratan administrasi sebagaimana tersebut pada persyaratan lamaran nomor 1 sampai dengan 13 ke **Website www.seleksijpt.lan.go.id**.

F. TAHAPAN SELEKSI

NO.	KEGIATAN	WAKTU
1.	Pengumuman	4 April 2016
2.	Pendaftaran online	4-22 April 2016
3.	Penerimaan upload persyaratan administrasi	5-23 April 2016
4.	Seleksi administrasi	5-25 April 2016
5.	Keputusan hasil seleksi administrasi	26 April 2016
6.	Penulisan makalah	29 April 2016
7.	Keputusan hasil penulisan makalah	3 Mei 2016
8.	Assessment Center	9-10 Mei 2016
9.	Seleksi wawancara oleh Panitia Seleksi	19 Mei 2016
10.	Keputusan hasil akhir	19 Mei 2016

Keterangan : Jadwal dapat berubah (tentatif) dan setiap perubahan akan diberitahukan kepada seluruh peserta melalui website www.lan.go.id.

hi
79.

G. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Seluruh proses administrasi sampai dengan tahapan akhir tidak dipungut biaya apapun dan dilakukan secara transparan;
2. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh peserta selama melaksanakan proses seleksi ditanggung peserta;
3. Panitia Seleksi tidak melakukan korespondensi dalam bentuk apapun, semua informasi yang terkait dengan proses seleksi akan diinformasikan melalui website www.lan.go.id;
4. Peserta seleksi harus pro aktif untuk melihat perkembangan pelaksanaan seleksi melalui Website : www.lan.go.id;
5. Apabila selama proses seleksi, peserta diketahui memberikan keterangan/data yang tidak benar, maka Panitia Seleksi berhak menggugurkan peserta seleksi;
6. Keputusan Panitia Seleksi setiap tahap bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 1 April 2016

Ketua Panitia Seleksi Terbuka
Calon Pimpinan Tinggi Madya
Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara,



Prof. Dr. J.B. Kristiadi